

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Secara geografis berada pada garis khatulistiwa yang terletak diantara dua lautan yaitu Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Posisi Indonesia ini juga terletak pada pertemuan antara tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Indonesia mempunyai 127 gunung api aktif dengan 79 diantaranya dikategorikan berbahaya oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Alam diakibatkan karena posisi geografis Indonesia tersebut. Posisi geografis Indonesia yang seperti ini menyebabkan Indonesia rawan bencana seperti letusan gunung merapi, gempa bumi, longsor, tsunami.

Segala sesuatu yang menghancurkan dan merugikan baik oleh alam dan juga oleh manusia dapat disebut dengan “bencana”. Ketika terjadi bencana, baik bencana alam atau bencana yang diakibatkan oleh manusia akan mengganggu berbagai sendi kehidupan untuk jangka waktu tertentu. Bencana yang ditimbulkan akan mengurangi potensi sumber daya ekonomi.

Dampak bencana yang dirasakan oleh pemerintah terasa cukup besar, seperti banyaknya infrastruktur sosial yang mengalami kerusakan seperti kerusakan pada rumah penduduk, bendungan, jalan, perkantoran dan sebagainya dan juga terjadinya gangguan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Dampak bencana yang dirasakan oleh pemerintah juga dapat dilihat dari sisi perekonomian, dimana dengan terjadinya bencana akan merubah struktur perekonomian masyarakat terdampak bencana. Sedangkan dampak bencana yang dirasakan pada tingkat rumah tangga dapat menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan, kehilangan lapangan pekerjaan, semakin bertambah penduduk miskin dan juga terganggu secara psikologis.

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow dan Swan (1994) mengatakan bahwa bencana akan memunculkan dampak turunan. Dampak turunan bagi kehidupan sosial ekonomi di daerah terdampak akan menghancurkan atau menghilangkan modal perkapita. Bencana pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penurunan output perkapita.

bencana yang diakibatkan oleh alam atau manusia akan menyebabkan kerusakan aset ekonomi yang akan menimbulkan kerugian finansial. kerusakan aset yang terjadi akan menyebabkan terganggu atau bisa mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Imbas dari terhentinya kegiatan produksi akan menurunkan output (Benson dan Clay, 2004).

Asia Disaster Preparedness Center telah melakukan kajian empiris terhadap bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Dampak bencana yang terjadi mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, meningkatnya pengangguran, jaminan akan masa depan yang tidak jelas, terjadinya penurunan output, bertambahnya penduduk miskin dan memburuknya perekonomian masyarakat di daerah terdampak bencana. Bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2007 di Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi mengakibatkan kerugian materi, kerugian ekonomi diantaranya kerusakan stock value yaitu aset pemerintah dunia usaha dan masyarakat dan hilangnya aset ekonomi.

Daerah pesisir barat pulau Sumatera merupakan daerah yang sangat berpotensi terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami. Salah satu daerah pesisir barat yang sangat berpotensi atau rawan terhadap bencana adalah Kabupaten Padang Pariaman. Kawasan ini berada di sepanjang Bukit Barisan di Pulau Sumatera terletak pada zona aktif serta pantai barat Sumatera yang terletak dekat zona penunjaman dari lempeng Samudera Hindia dengan Lempeng Australia. Tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia membentuk Zona Benioff. Pada Zona Benioff terjadi penyusupan aktif secara terus menerus bergerak berarah Barat – Timur yang merupakan zona bergempa dengan seismik cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Padang Pariaman menjadi daerah tektonik dan merupakan daerah sumber gempa.

Harian Kompas tanggal 23 Juni 2007 memberitakan bahwa menurut penelitian ahli kegempaan nasional dan internasional kemungkinan terjadinya pengulangan gempa dalam skala besar (mega thrust) sangat besar. Tahun 1797 dan 1833 terjadi gempa besar 9 skala richter di kawasan ini karena terdapat patahan di Kepulauan Mentawai. Dari pengalaman tersebut peneliti berpendapat bahwa tidak ada pelepasan energi yang cukup besar nyaris 200 tahun.

Bencana gempa bumi di yang berpusat di Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di daerah Tandikat pada tanggal 30 September 2009 lalu menyebabkan kerusakan di beberapa Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat. Daerah terparah mengalami kerusakan adalah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Korban jiwa dan kerusakan infrastruktur bangunan terjadi di dua daerah terdampak bencana tersebut.

Data yang di peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan kerugian masyarakat pada gempa 30 September 2009 akibat kerusakan rumah yang di derita sebagai berikut :

Tabel 1. Kerusakan Infrastruktur/rumah gempa 30 September 2009 di Kabupaten Padang Pariaman

NO	KECAMATAN	RUMAH PENDUDUK		
		Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak berat
1	Batang Gasan	361	445	1721
2	Sungai Limau	981	1.095	4.583
3	V Koto Kampung Dalam	694	1.180	4.523
4	IV Koto Aur Malintang	699	1.316	3.274
5	Sungai Geringging	587	1.137	5.609
6	V Koto Timur	91	360	4.435
7	Patamuan	684	1.073	2.025
8	VII Koto Sei Sarik	989	1.913	6.278
9	2 X 11 Enam Lingkung	392	811	3.265
10	2 X 11 Kayu Tanam	2.409	1.014	861
11	Sintuk Toboh Gadang	709	911	2.761
12	Lubuk Alung	1.803	605	5.447
13	Batang Anai	2.666	1.775	1.389
14	Nan Sabaris	1.001	1.384	4.011
15	Ulakan Tapakis	609	692	3.684
16	Padang Sago	130	250	2.270
17	Enam Lingkung	343	564	3.557
Jumlah		15.148	16.525	59.693

Sumber : Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman, 2010

Tabel 1 diatas memperlihatkan besarnya kerugian yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Kerusakan rumah yang ditimbulkan oleh bencana gempa tersebut meliputi rusak ringan 15.148 rusak ringan, 16,525 rusak sedang dan 59.693 rusak berat.

Bencana gempa bumi pada tahun 2009 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Padang Pariaman. Tahun 2009 tercatat jumlah masyarakat miskin sebanyak 45.000 jiwa (empat puluh lima ribu jiwa) menjadi 46.300 jiwa (empat puluh enam ribu tiga ratus jiwa) pada tahun 2010. Terjadi peningkatan masyarakat miskin sebanyak 6.300 jiwa.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 menyatakan bahwa ketika terjadinya bencana masyarakat miskin dan kaum marjinal yang berada di kawasan rawan bencana merupakan pihak yang paling menderita kerugian. Oleh

karena itu, kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Paradigma pengurangan resiko bencana belakangan ini telah beralih dari responsif menjadi pencegahan. Upaya penanganan bencana alam sekarang ini mencakup kedalam berbagai kegiatan mulai dari penguatan kapasitas melalui pengurangan tingkat kerentanan masyarakat dilanjutkan dengan upaya penanganan bencana alam, mitigasi bencana ketika terjadinya bencana sampai penanganan korban akibat dari bencana itu sendiri. Upaya tersebut dapat melalui peningkatan sosial, ekonomi, fisik, serta lingkungan sehingga ketika terjadinya bencana masyarakat dapat bertahan di daerahnya (United Nation-International Strategy for Disaster Reduction, 2004).

Terbitnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengubah cara pandang dalam pengelolaan penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif menjadi pengurangan resiko bencana yang lebih menekankan pada upaya mitigasi dan membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Inti dari pengurangan resiko bencana adalah membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana dengan menurunkan kerentanan dan menaikkan kapasitas atau ketangguhan masyarakat. Secara umum dari segi ekonomi biaya mitigasi sama dengan biaya investasi. Dimana untuk US\$ 1 yang dialokasikan untuk biaya mitigasi akan menghemat US\$ 15-16 dalam fase rekonstruksi dan rehabilitasi.

Selanjutnya, dampak dari bencana akan berakibat terjadinya perubahan isu dari masalah sosial-ekonomi menjadi isu politik. Dalam hal ini yang paling menderita adalah masyarakat dari golongan bawah/miskin. Sedangkan masyarakat dari golongan kaya dengan mudah dapat mengungsi ke tempat lain, membeli rumah baru, tinggal di rumah keluarga atau tinggal di hotel (Majelis Guru Besar ITB, 2009).

Perubahan paradigma dalam memandang konsep bencana, mendukung kajian tentang kerentanan dan ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. Kajian kerentanan dan ketahanan masyarakat di daerah rawan bencana merupakan langkah awal untuk meminimalkan kerugian akibat terjadinya bencana. Tingkat kerentanan yang tinggi pada suatu wilayah akan menyebabkan sulitnya masyarakat untuk kembali ke kondisi awal mereka sebelum terjadinya bencana. Sedangkan dengan tingkat ketahanan masyarakat yang tinggi akan mempermudah masyarakat untuk memulihkan kondisi mereka ke kondisi awal sebelum terjadinya bencana.

Kerentanan (vulnerability) merupakan suatu kondisi dari komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Sedangkan Ketahanan adalah kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana pada

semua tahapannya melalui berbagai sistem yang dikembangkannya (tradisi budaya, gotong royong, kesiapan darurat, kemampuan bangkit kembali, kemampuan membangun kembali, kemampuan membangun yang siap menghadapi ancaman bencana dsb).

Penelitian yang dilakukan oleh Lal, Reshika, dan Holland (2009) dengan judul “*Relationship Between Natural Disasters and Poverty: a Fiji Case Study*” memperlihatkan bahwa rumah tangga miskin yang tidak memiliki aset keuangan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap bencana alam. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan dan merehabilitasi cepat terhadap kondisi mereka tersebut.

Kecamatan Batang Anai dijadikan sebagai daerah penelitian dikarenakan daerah ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dan merupakan daerah yang terparah akibat bencana gempa 30 September 2009.

B. Masalah Penelitian

Dengan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat disimpulkan adalah Bagaimana kerentanan ekonomi dan ketahanan ekonomi masyarakat di daerah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan bagaimana kebijakan pemerintah mempersiapkan ekonomi masyarakat berdasarkan hasil analisa kerentanan dan ketahanan ekonomi Kecamatan Batang Anai dalam menghadapi bencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Menganalisa kerentanan ekonomi dan ketahanan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan merumuskan kebijakan pemerintah dalam menghadapi bencana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual (*intellectual exercise*) yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi dalam disiplin ilmu yang digeluti oleh penulis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka untuk menghadapi bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang serta untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan.